



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 4b, Oktober 2024

# MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

## Journal of MISTER

Vol. 1, No. 4b, Oktober 2024

Pages: 2658–2664

### Strategi Efektif dalam Pendirian Perseroan Terbatas: Proses, Kendala dan Solusi untuk Keberhasilan Bisnis

Muhammad Danda Evantrino, Karina Salsabila Meiralda

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

#### Article in Journal of MISTER

|              |                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Available at | : <a href="https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index">https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index</a> |
| DOI          | : <a href="https://doi.org/10.32672/mister.v1i4b.2343">https://doi.org/10.32672/mister.v1i4b.2343</a>                               |

#### How to Cite this Article

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APA          | : Danda Evantrino, M., & Meiralda, K. S. (2024). Strategi Efektif dalam Pendirian Perseroan Terbatas: Proses, Kendala dan Solusi untuk Keberhasilan Bisnis. <i>Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research</i> , 1(4b), 2658 – 2664. <a href="https://doi.org/10.32672/mister.v1i4b.2343">https://doi.org/10.32672/mister.v1i4b.2343</a> |
| Others Visit | : <a href="https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index">https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index</a>                                                                                                                                                                                                                                               |

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



## Strategi Efektif dalam Pendirian Perseroan Terbatas: Proses, Kendala dan Solusi untuk Keberhasilan Bisnis

Muhammad Danda Evantrino <sup>1</sup>, Karina Salsabila Meiralda <sup>2</sup>  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Email Korespodensi: [dandaevantrino@students.unnes.ac.id](mailto:dandaevantrino@students.unnes.ac.id)

Diterima: 29-10-2024

| Disetujui: 30-10-2024

| Diterbitkan: 31-10-2024

### ABSTRACT

*The establishment of a Limited Liability Company (PT) is an essential step for business owners in Indonesia seeking legal status and legal protection for their enterprises. This article discusses effective strategies for establishing a PT, starting from the initial document preparation, drafting of the deed of incorporation before a notary, to the legal entity's approval by the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) and obtaining business permits through the Online Single Submission (OSS) system. Common challenges in PT establishment include high notary fees, time-consuming processes, and unclear administrative procedures across various government agencies. As a solution, the OSS system serves as a critical alternative for simplifying bureaucracy, while the Job Creation Law No. 11 of 2020 provides small businesses with eased requirements, such as the elimination of minimum capital requirements. By understanding the right strategies and following streamlined procedures, company founders can overcome various obstacles in establishing a PT, potentially enhancing long-term business success. This article provides practical guidance to help business owners navigate the PT establishment process effectively, efficiently, and in accordance with applicable legal regulations.*

**Keywords:** *Establishment of Limited Liability Company (PT), Strategy, Business Licensing*

#### ABSTRAK

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) merupakan langkah penting bagi pelaku usaha di Indonesia yang menginginkan status legal dan perlindungan hukum bagi perusahaannya. Artikel ini membahas strategi efektif dalam proses pendirian PT, dimulai dari tahap persiapan dokumen awal, pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, hingga pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan perolehan izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kendala yang sering ditemui dalam pendirian PT meliputi biaya notaris yang tinggi, waktu proses yang memakan waktu, serta ketidakjelasan prosedur administrasi di beberapa instansi pemerintah. Sebagai solusi, pemanfaatan OSS menjadi alternatif penting untuk menyederhanakan birokrasi, sementara kebijakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 memberikan kemudahan bagi usaha kecil melalui penghapusan persyaratan modal dasar minimum. Dengan memahami strategi yang tepat dan mengikuti prosedur yang telah disederhanakan, pendiri perusahaan dapat mengatasi berbagai hambatan dalam mendirikan PT, sehingga berpotensi meningkatkan keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Artikel ini memberikan panduan praktis yang dapat membantu pelaku usaha menjalankan proses pendirian PT secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Strategi, Perizinan Usaha

## PENDAHULUAN

Pendirian perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia merupakan langkah yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis yang ingin meningkatkan kredibilitas dan perlindungan hukum bagi usahanya. PT dipilih karena struktur badan hukum ini memisahkan tanggung jawab pribadi pemilik dari kewajiban perusahaan, sehingga dapat melindungi aset pribadi pemilik. Selain itu, bentuk PT memungkinkan pemilik bisnis untuk mendapatkan tambahan modal dengan menarik investor melalui penerbitan saham. Meski pendirian PT menawarkan berbagai keuntungan, prosesnya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prosedur hukum dan administratif serta persiapan menghadapi kendala yang sering muncul dalam proses tersebut.

Pada dasarnya, proses pendirian PT di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan disempurnakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Aturan ini mengatur langkah-langkah dasar yang harus diikuti oleh calon pendiri PT, termasuk prosedur perolehan status badan hukum yang sah. Beberapa tahapan penting dalam proses ini antara lain pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, pengajuan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta pengurusan izin usaha. Dengan adanya UU Cipta Kerja, beberapa persyaratan untuk pendirian PT telah dipermudah, seperti penghapusan modal dasar minimum untuk PT Kecil dan Mikro, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Meskipun terdapat kemudahan, kendala dalam proses pendirian PT masih kerap ditemui. Pelaku usaha sering dihadapkan pada masalah biaya yang relatif tinggi, terutama untuk biaya jasa notaris dan biaya pengurusan izin usaha. Selain itu, dalam beberapa kasus, ketidakpastian mengenai prosedur administrasi di berbagai instansi pemerintah juga menjadi hambatan tersendiri, sehingga memperlambat proses pendirian. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kurangnya pemahaman mengenai aturan dan ketentuan hukum terkait pendirian PT, yang bisa mempersulit pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan hukum.

Di samping kendala administratif dan biaya, pemilik usaha perlu menghadapi kompleksitas yang muncul dari peraturan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Beberapa daerah mungkin memiliki persyaratan tambahan yang berbeda dengan daerah lain, terutama terkait perizinan usaha. Hal ini membuat pendirian PT menjadi semakin kompleks, khususnya bagi pelaku usaha yang belum familiar dengan peraturan di wilayah tertentu. Oleh karena itu, strategi yang tepat dan efektif sangat diperlukan agar proses pendirian PT dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa strategi efektif yang dapat diterapkan oleh calon pendiri PT mencakup langkah-langkah persiapan yang matang, seperti mempersiapkan dokumen yang diperlukan sejak awal, mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk biaya pengurusan izin, serta mempertimbangkan penggunaan jasa konsultan hukum atau ahli yang dapat membantu mempercepat proses pendirian. Selain itu, pemanfaatan sistem perizinan online melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikembangkan oleh pemerintah dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha dalam mengatasi kendala birokrasi. Dengan OSS, proses perizinan yang sebelumnya memerlukan waktu cukup lama dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien, karena semua tahapan dapat dilakukan secara daring tanpa perlu mendatangi berbagai instansi.

Selain solusi administrasi, pemahaman yang baik tentang kebijakan hukum dan regulasi yang berlaku akan membantu calon pendiri PT dalam menghadapi kendala yang mungkin timbul. Misalnya, kebijakan yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja telah memberikan peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk mendirikan PT tanpa terbebani syarat modal minimum, yang sebelumnya dianggap menjadi penghalang. Penerapan regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pendirian PT, tetapi juga

untuk mendorong iklim bisnis yang lebih inklusif, dengan harapan semakin banyak usaha kecil dan menengah yang dapat berkembang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Hukum Pendirian Perseroan Terbatas**

Proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia adalah serangkaian langkah administratif dan hukum yang wajib diikuti oleh para pelaku usaha yang ingin mendirikan perusahaan dengan status badan hukum. Secara umum, pendirian PT diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, yang bertujuan menyederhanakan proses ini agar lebih ramah bagi pelaku usaha. Tahap pertama dalam proses pendirian PT adalah persiapan dokumen awal, di mana pendiri perusahaan harus mempersiapkan informasi dasar, seperti nama perusahaan, bidang usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta identitas lengkap para pendiri dan pengurus PT. Nama perusahaan yang dipilih harus unik dan belum terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar tidak terjadi duplikasi.

Setelah informasi dasar ini disiapkan, pendiri perlu membuat akta pendirian PT di hadapan notaris, yang memuat data penting seperti identitas pendiri, susunan pengurus, struktur kepemilikan saham, modal dasar, serta ketentuan anggaran dasar perusahaan. Akta pendirian ini menjadi dokumen resmi yang kemudian digunakan untuk mengajukan pengesahan PT ke Kemenkumham. Dalam tahap ini, peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kemudahan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melalui penghapusan persyaratan modal dasar minimum. Setelah akta pendirian PT selesai dan ditandatangani oleh notaris, dokumen tersebut diajukan ke Kemenkumham untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengesahan, yang menandakan bahwa PT telah sah secara hukum. SK pengesahan ini memberikan status badan hukum pada PT sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan hak dan kewajiban yang diakui negara.

Setelah informasi dasar ini disiapkan, pendiri perlu membuat akta pendirian PT di hadapan notaris, yang memuat data penting seperti identitas pendiri, susunan pengurus, struktur kepemilikan saham, modal dasar, serta ketentuan anggaran dasar perusahaan. Akta pendirian ini menjadi dokumen resmi yang kemudian digunakan untuk mengajukan pengesahan PT ke Kemenkumham. Dalam tahap ini, peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kemudahan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melalui penghapusan persyaratan modal dasar minimum. Setelah akta pendirian PT selesai dan ditandatangani oleh notaris, dokumen tersebut diajukan ke Kemenkumham untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengesahan, yang menandakan bahwa PT telah sah secara hukum. SK pengesahan ini memberikan status badan hukum pada PT sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan hak dan kewajiban yang diakui negara.

Langkah berikutnya setelah memperoleh SK pengesahan adalah mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). NIB berfungsi sebagai identitas perusahaan untuk berbagai keperluan administrasi, termasuk pengurusan izin usaha dan izin komersial yang diperlukan. Pelaku usaha dapat memperoleh berbagai izin tersebut dalam satu sistem terintegrasi OSS, yang mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan tanpa harus mengunjungi berbagai instansi. Setelah izin usaha dan izin komersial diperoleh, PT dapat membuka rekening bank perusahaan atas nama PT untuk

memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Bank umumnya meminta dokumen seperti akta pendirian, SK pengesahan dari Kemenkumham, dan NIB sebagai syarat pembukaan rekening.

Tahapan terakhir dalam pendirian PT adalah pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan, yang menjadi identitas perpajakan bagi PT. NPWP ini dapat diurus melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat atau melalui sistem daring Direktorat Jenderal Pajak. PT yang telah memiliki NPWP harus memenuhi kewajiban perpajakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh) badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan memahami dan mengikuti prosedur yang benar, para pendiri perusahaan dapat mendirikan PT secara efektif dan memperoleh legalitas usaha yang sah. Keberadaan peraturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga sangat membantu dalam mempercepat proses pendirian PT, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang sebelumnya terbebani persyaratan modal minimum.

### **Kendala Dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT)**

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia masih mensyaratkan adanya minimal dua pendiri, yang sering dianggap kurang fleksibel. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha yang ingin mendirikan PT dengan satu pendiri. Selain itu, proses pendirian PT sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti pemilihan nama perusahaan yang tidak sesuai, ketidaksesuaian dokumen yang diajukan, serta modal yang tidak memenuhi syarat. Pengusaha juga perlu memastikan bahwa bidang usaha yang diajukan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang merupakan acuan dalam penyusunan akta pendirian dan izin usaha. Syarat modal dasar yang sebelumnya ditetapkan minimal Rp50 juta kini telah dihapuskan, namun modal harus tetap disesuaikan dengan skala usaha yang akan dijalankan.

Selain masalah modal dan dokumen administratif, kesalahan dalam penetapan direksi dan komisaris juga bisa berpengaruh pada struktur perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dan bahkan dapat berpotensi menimbulkan perselisihan antar pemegang saham. Komposisi pemegang saham, direksi, dan komisaris menjadi salah satu aspek penting dalam proses pendirian PT, mengingat PT wajib memiliki Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berperan dalam mengambil kebijakan utama perusahaan. Adanya RUPS ini bertujuan untuk menjaga agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan aturan yang berlaku.

Selain aspek legalitas, persyaratan administratif seperti kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Pengusaha (NIP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan izin domisili usaha yang sesuai dengan zonasi menjadi komponen krusial sebelum mendirikan PT. Biaya pendirian yang relatif tinggi dan tuntutan kepatuhan hukum juga perlu diperhitungkan karena setiap PT harus melakukan pelaporan berkala, termasuk laporan keuangan, RUPS, dan pelaporan pajak. Pengelolaan PT juga berpotensi mengalami konflik kepentingan antara pemegang saham, terutama pada saat pengambilan keputusan penting. Direksi dan komisaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas perusahaan, mematuhi ketentuan hukum, serta menjaga kerahasiaan informasi bisnis, meskipun harus tetap mematuhi ketentuan pelaporan publik. Ketelitian dan pemahaman mendalam atas proses ini sangat diperlukan agar pendirian PT berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Solusi Keberhasilan Bisnis Dalam Perseroan Terbatas (PT)**

Untuk mencapai kesuksesan dalam pendirian dan pengelolaan Perseroan Terbatas (PT), sangat penting bagi para pendiri untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang berlaku,

termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur sejumlah aspek utama, seperti persyaratan modal minimal, klasifikasi bidang usaha, serta ketentuan zonasi usaha. Pemahaman yang menyeluruh terhadap aturan ini membantu para pendiri menyiapkan dokumen dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam prosesnya, pemilihan nama perusahaan dan penetapan bidang usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) juga sangat penting, karena hal ini akan mempengaruhi kelancaran proses perizinan. Di samping itu, struktur pemegang saham, direksi, dan komisaris harus ditetapkan secara jelas dan seimbang serta disepakati bersama untuk mengurangi resiko konflik di kemudian hari.

Modal dasar PT perlu disesuaikan dengan skala bisnis yang direncanakan dan disepakati dalam perjanjian pemegang saham. Perjanjian ini sangat penting sebagai pedoman dalam menetapkan hak, kewajiban, dan mekanisme pengambilan keputusan, yang berfungsi untuk menjaga stabilitas internal perusahaan. Selain itu, dokumen administratif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Pegawai (NIP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan izin domisili juga harus dilengkapi dengan cermat agar proses administratif berjalan lancar. Setelah PT berdiri, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi salah satu kewajiban penting yang berfungsi sebagai forum utama dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pelaporan berkala, termasuk laporan keuangan dan pajak, juga harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjaga kepatuhan hukum dan transparansi.

Perencanaan keuangan yang matang juga sangat krusial dalam mengelola risiko keuangan yang mungkin muncul selama operasional PT. Penghitungan yang teliti terhadap biaya operasional, modal awal, dan cadangan dana darurat akan membantu perusahaan menghadapi potensi kendala keuangan. Selain itu, peningkatan kapasitas manajerial melalui pelatihan akan meningkatkan kemampuan tim dalam pengambilan keputusan yang cepat serta adaptasi terhadap perubahan pasar, terutama mengingat struktur hirarki PT yang mungkin kurang fleksibel. Struktur organisasi yang efisien dengan tim kecil yang fokus pada tanggung jawab spesifik dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Agar pendirian PT memenuhi seluruh aspek legalitas, konsultasi dengan ahli hukum sangat dianjurkan untuk memastikan dokumen yang dibuat sesuai aturan, sehingga risiko hukum dan pajak di masa depan dapat diminimalisasi.

## KESIMPULAN

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia memberikan keuntungan signifikan bagi pelaku usaha, seperti perlindungan hukum, kemudahan dalam mendapatkan modal, serta pemisahan aset pribadi dari aset perusahaan. Meskipun demikian, proses pendirian PT cukup kompleks, mencakup sejumlah persyaratan administratif dan legal yang diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Reformasi dalam peraturan, terutama melalui Undang-Undang Cipta Kerja, telah memberikan kemudahan seperti penghapusan modal dasar minimum bagi UMKM. Namun, tantangan tetap ada, seperti biaya tinggi, ketidakpastian prosedur administrasi, serta variasi peraturan perizinan di setiap daerah. Untuk mendirikan PT dengan efektif, diperlukan persiapan dokumen yang teliti, anggaran yang memadai, serta pemahaman mendalam tentang aturan yang berlaku. Pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS) membantu mempercepat pengurusan izin yang sebelumnya memerlukan proses panjang.

## **SARAN**

Calon pendiri PT perlu memahami regulasi dan menyiapkan dokumen sejak awal, termasuk nama perusahaan, bidang usaha sesuai KBLI, dan susunan pengurus, untuk meminimalisasi hambatan administratif. Pengelolaan biaya yang mencukupi serta penggunaan jasa konsultan hukum sangat disarankan agar kesalahan prosedur dapat dihindari. Pemanfaatan sistem OSS secara maksimal akan membantu mempercepat proses perizinan secara daring. Selain itu, penyusunan struktur internal yang jelas, seperti keseimbangan peran pemegang saham, direksi, dan komisaris, dapat mengurangi konflik internal dan meningkatkan adaptabilitas perusahaan. Konsultasi dengan ahli hukum serta kepatuhan terhadap pelaporan pajak secara rutin juga penting untuk menjaga transparansi dan meminimalisasi risiko hukum di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Crisandyna, M. K. T., Sumardika, I. N., & Arini, D. G. D. (2020). Aspek Perizinan dalam Pendirian Perseroan Terbatas dengan Sistem Online Single Submission. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 118-123.
- Ekadjaja, A. (2024). MEMBANGUN LANDASAN PENGETAHUAN BISNIS: PELATIHAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS UNTUK SISWA SMA KRISTEN YUSUF. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 878-883.
- Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14(2), 725-738.
- Izin Edar. (2024, November 7). Penjelasan lengkap PT: Definisi, fungsi, dasar hukum, dan syarat. Izin Edar. Retrieved from <https://izinedar.com/penjelasan-lengkap-pt-definisi-fungsi-dasar-hukum-dan-syarat/>
- Putri, A. A. (2020). Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal. *Indonesian Notary*, 2(4), 38..
- Rambling, N. (2013). Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).
- Riyanto, A. (2017, October 31). \*Mengapa harus memilih perseroan terbatas?\* BINUS University Business Law. Retrieved from <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/mengapa-harus-memilih-perseroan-terbatas/>
- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562-1580.
- Salim, F. (2020). Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). *Recital Review*, 2(2), 140-156.
- Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2).
- Wahyuni, R., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian Di dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 51-64.
- Widyari, D. P. (2024). Analisis Yuridis Perbandingan Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 65-80.